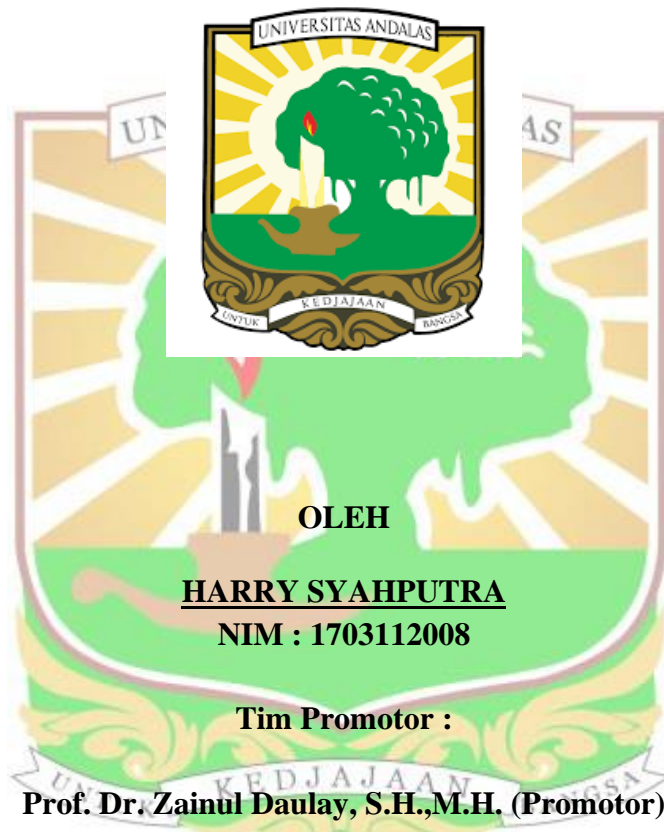


**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PENERBITAN SURAT UTANG JANGKA MENENGAH**

*(MEDIUM TERM NOTES)*

**DISERTASI**



**OLEH**

**HARRY SYAHPUTRA**

**NIM : 1703112008**

**Tim Promotor :**

**Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H.,M.H. (Promotor)**

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H.,M.Hum. (Co Promotor)**

**Dr. Jean Elvardi, S.H.,M.H. (Co Promotor)**

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG 2024**

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENERBITAN**  
**SURAT UTANG JANGKA MENENGAH**  
**(MEDIUM TERM NOTES)**

Harry Syahputra, NIM : 1703112008, Program Studi Doktoral Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 446 Halaman, 2024

*Medium Term Notes* (MTN) ini sejatinya merupakan suatu bentuk kegiatan investasi bagi para pemegang *Medium Term Notes* (MTN) dan juga merupakan alternatif pembiayaan untuk perusahaan yang didasarkan pada suatu perjanjian jual beli antara perusahaan penerbit selaku pencari modal dan perusahaan pemegang *Medium Term Notes* (MTN) selaku pemberi modal, dimana didalamnya terdapat janji atas pemberian bunga disetiap bulannya oleh penerbit kepada pemegang *Medium Term Notes* (MTN). Namun terdapat banyak permasalahan dalam hal penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) khususnya terkait banyak kasus gagal bayar. Kurangnya perlindungan kepada investor dan investasi kategori beresiko tinggi menjadi pembicaraan utama dari *Medium Term Notes* (MTN) saat ini. Dalam data yang dirilis resmi oleh Pefindo selaku perusahaan yang memberikan pemeringkatan pada *Medium Term Notes* (MTN), selama tahun 2023 terjadi gagal bayar yang mencapai 25 Triliun Rupiah yang mencakup 11 industri dari 67 klasifikasi industri instrumen utang. Penerapan prinsip kehati-hatian akan menjadi faktor utama untuk meminimalisasikan terjadinya gagal bayar terhadap *Medium Term Notes* (MTN) dan persyaratan yang diperlukan dalam setiap penerbitan *Medium Term Notes* (MTN). Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengidentifikasi pengaturan penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) dalam hukum positif di Indonesia. 2) Untuk mengkaji penerapan kepastian kehati-hatian dalam pembelian *Medium Term Notes* (MTN) sebagai sebuah surat utang bagi investor. 3) Untuk menganalisis kepastian hukum hak investor dalam terjadi gagal bayar atas pembayaran *Medium Term Notes* (MTN). Metode penelitian normatif-empiris dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum tertentu, lalu mengumpulkan data empiris untuk menguji sejauh mana prinsip tersebut diterapkan. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : 1. *Medium Term Notes* (MTN) merupakan instrumen pasar modal yang bersifat utang (*bonds*) yang merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan dan surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal dalam perusahaan. MTN merupakan surat berharga yang di dalam suratnya memuat pernyataan berutang dari pihak penerbit kepada pemegang MTN dan menyanggupi untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut; 2. MTN merupakan surat berharga yang di dalam suratnya memuat pernyataan berutang dari pihak penerbit kepada pemegang MTN dan menyanggupi untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokok dengan bunga tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut dan kesimpulan; 3. Berdasarkan POJK No. 30 Tahun 2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi investor sebagai pemegang MTN. Namun masih membuka celah risiko terjadi gagal bayar terhadap MTN oleh penerbit efek.

**Kata Kunci : Implementasi, Prinsip, Penerbitan, Surat Utang Jangka Menengah**

## ABSTRACT

### IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES IN ISSUING MEDIUM TERM NOTES

Harry Syahputra, NIM: 1703112008, *Doctoral Study Program in Legal Studies,  
Faculty of Law, Andalas University, 446 Pages, 2024*

*Medium Term Notes (MTN) are actually a form of investment activity for Medium Term holders Notes (MTN) are also alternative financing for companies based on a sale and purchase agreement between the issuing company as the capital seeker and the Medium Term Notes (MTN) holding company as the capital provider, in which there is a promise to pay interest every month by the issuer. to holders of Medium Term Notes (MTN). However there are many legal problem related to isuuing of Medium Term Notes (MTN) especially about default of payment of Medium Term Notes (MTN). Less protection for the investor and high risk categorize investment already became main issue of Medium Term Notes (MTN) nowadays. Based on official data release by Pefindo as company which give rating on Medium Term Notes (MTN), during 2023 there has been default case up to 25 billion Rupiah that cover 11 segment of 67 classification debt securities industry. Implementation The Prudential Principles will be main factor to minimalize default of payment of Medium Term Notes (MTN) and will be necessary requirement to every issued Medium Term Notes (MTN). The objective of this research are : 1) Identify the regulation for issuing Medium Term Notes (MTN) based on indonesian law. 2) Examining implementation of prudential principles for purchasing Medium Term Notes (MTN) as debt securities for investor. 3) Analyze and formulate the legal certainty of investor right in terms of default of Medium Term Notes (MTN) payment. The normative-empirical research method can be carried out by indentifying certain legal principles and then collecting empirical data to test the extend to which this principles are applied. The conclusions of this research are: 1. MTN or Medium Term Notes is a debt capital market instrument (bons) which is proof of recognition of debt from the company and ownership securities (equity or shares) which is proof of capital participation in the company. MTN is a securities which in the letter contains a statement of indebtedness from the issuer to the MTN holder and undertakes to pay or return the principal amount with certain interest as stated in the letter. Conclusion 2. MTN is a securities which in the letter contains a statement of debt from the issuer to the MTN holder and undertakes to pay or return the principal amount with certain interest as stated in the letter and conclusion 3. According to the OJK, with the issuance of POJK No.30 of 2019 about Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Conducted Without Any Public Offering, the aim is to provides legal protection for investors as MTN holders, consumers and the public, but this POJK regulation does not rule out the risk of default on MTN payments by securities issuers.*

*Keywords: Implementation, Principles, Issuance, Medium Term Debt Securities.*